

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

(Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)

LAILY EKA TRISDIANTI

Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

eka_lely@ymail.com

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan surat izin usaha perdagangan. Hal ini dilatar belakangi banyaknya pengusaha perdagangan di kabupaten blitar saat ini, baik mulai dari usaha kecil, menengah dan besar. Untuk mendirikan sebuah usaha pengusaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau sering disebut SIUP. Tetapi pada kenyataannya banyak Pengusaha perdagangan yang tidak memiliki SIUP. Hal ini bisa saja terjadi karena belum adanya pemahaman dan pengetahuan atas pentingnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan surat izin usaha perdagangan di kabupaten Blitar, maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kabupaten Blitar dan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staf KPTSP Kabupaten Blitar dan sampel yang digunakan adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dan Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Di sisi lain terdapat juga faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan SIUP yaitu, faktor pendukung pendukung dan penghambat. Factor pendukung disini dibagi menjadi dua yaitu factor pendukung intern yang meliputi Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Blitar dan Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang kedua factor pendukung ekstern yang meliputi Tingkat kepedulian Pengusaha perdagangan, Tingkat produktifitas pengusaha perdagangan, Tingkat ekonomi, Tingkat pendidikan, Tingkat kepatuhan, Tingkat Kebudayaan Masyarakat. Selain dari factor pendukung juga terdapat factor penghambat yang dibagi juga menjadi dua yaitu faktor penghambat intern yang meliputi Terbatasnya sarana dan prasarana, Masih banyaknya Perda yang belum disesuaikan, Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang memerlukan izin gangguan dan IMB, anggaran yang masih kurang. Selain itu juga terdapat factor penghambat ekstern yang meliputi Masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, Belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Mereka kebanyakan baru mengurus jika sangat memerlukan misalnya : untuk meminjam uang ke bank,dll, Adanya anggapan atau setigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit, Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepat waktu dan Aparatu pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.

Selanjutnya upaya kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Blitar dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan meliputi : Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Melakukan “jemput bola” dengan mengadakan *One Day Service* untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Melakukan perbaikan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Perizinan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)**

LAILY EKA TRISDIANTI

State Administrative Law

UB Law School

eka_lily@ymail.com

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses the factors that influence the issuance of trade license. This background is many owners trade in Blitar today, both ranging from small, medium and large. To set up a trading business entrepreneur must have a trade license or often called SIUP. But in fact many entrepreneurs who do not have SIUP trade. This could happen because of the lack of understanding and have the knowledge of the importance of trade license.

In an attempt to determine the factors that influence the issuance of trade license in Blitar district, the kind of research that is used is the juridical Juridical empirical sociological approach, an approach that examines the laws that apply in this Ministerial Regulation No. 36 / M -DAG/PER/2007 about trade license issuance associated with the realities that occur in society. Research sites in the district and in the Office Blitar One Stop Blitar, types and data sources include primary data and secondary data. The population used in this study were all the staff KPTSP Blitar and sampel used is the Head Office One Stop Blitar and trade license applicant. Data collection techniques used are secondary data and primary data. Then, all data were analyzed by descriptive analysis.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, that the factors that influence the effectiveness of a rule or the execution factors, there are five factors that law enforcement factors, factor means or facilities, community factors and cultural factors. On the other hand there are also factors that affect the issuance of the Business License, supporting factors supporting and inhibiting. Supporting factor here is divided into two internal factors that include supporting human resources in the Office Services One Stop Blitar and Fittings administrative requirements in the management of the trade license. The second factor that includes the level of external support concerns Entrepreneur trade, commerce entrepreneurs productivity level, economic level, education level, level of compliance, Level Cultural Society. In addition there is also a supporter of the factors inhibiting factor is also divided into two, namely internal inhibiting factors include

limited infrastructure, still have not adjusted to local decisions, lack of coordination with relevant technical agency for trade license that requires permission disorder and IMB, budget are still lacking. There are also external factors inhibiting covering public does not know the procedure or procedures in the care of the trade license, yet the awareness of employers to take care of the trade license. They are mostly new manage if darting require for example: to borrow money from the bank, etc. The notion that a procedure or negative stigma licensing services convoluted, Settlement permits too long or not timely and Aparatu government or bureaucrats who still bercitra negative.

Further attempts one stop service office Blitar district in improving service trade business license include: Facilitate and accelerate the process of issuing trade license, Perform "pick up the ball" by holding a One Day Service for issuance of trade license, Increasing Human Resources (HR), Doing repair of facilities and infrastructure.

Keywords: Licensing,trade license, Services One Stop

A. LATAR BELAKANG

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam suatu usaha perdagangan. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat menentukan jadi tidaknya suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik. Untuk itu menteri perdagangan mengeluarkan peraturan No 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.¹ Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah, lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahal biaya yang harus dipikul oleh masyarakat. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah tampaknya tidak tinggal diam. Besarnya keinginan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seiring dengan menguatnya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah menata berbagai pelayanan publik dan salah satunya pelayanan dibidang perizinan.

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan reformasi administrasi untuk memperbaiki citra birokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggara pelayanan perijinan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan dalam berbagai aspek, baik menyangkut aspek sistem, kelembagaan dan sumberdaya aparatur daerah. Untuk itulah pemerintah kabupaten Blitar mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Publik Kantor

¹ Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 17

Pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Blitar yang bertujuan untuk melakukan percepatan pelayanan perizinan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk menyelenggarakan usaha perdagangan ini, Setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar diwajibkan untuk melakukan perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) agar nantinya dapat digunakan sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Besar kecilnya suatu usaha, tergantung dengan modal awal yang digunakan seperti usaha kecil seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ini dikecualikan terhadap :

- a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
- b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.²

Untuk itu perlu pemahaman pengetahuan atas faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan prosedur perizinan secara efektif terutama bagi aparat/pegawai dinas perizinan kabupaten Blitar sangat penting. Untuk mensosialisasikan masalah prosedur perizinan sangat penting bagi pemohon izin. Khususnya Izin Usaha Perdagangan. Hal ini

² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

sangat diperlukan karena prinsip cepat, biaya murah merupakan tuntutan pelayanan bagi masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Hal ini berarti cepatnya proses memperoleh izin menjadi tolak ukur pelayanan yang baik. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah pelayanan yang baik terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu diupayakan oleh pemerintah daerah.

Masalah mendasarnya dari banyak pengusaha perdagangan yang ada di Kabupaten Blitar masih banyak yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Hal ini bisa saja terjadi karena belum adanya sosialisasi tentang pengetahuan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan prosedur perizinan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan?

C. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu: ³

- 1) faktor hukum,
- 2) faktor penegak hukum,
- 3) faktor sarana atau fasilitas,
- 4) faktor masyarakat dan
- 5) faktor budaya

Terdapat 2 macam faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yaitu pertama faktor-faktor pendukung yang meliputi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor-faktor penghambat yang meliputi faktor internal dan eksternal.

a. Faktor-faktor pendukung internal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam proses permohonan sampai penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), meliputi :

- 1) Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

Banyaknya Sumber daya manusia yang ada di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Semakin banyaknya pegawai maka semakin cepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Sebaliknya, jika jumlah pegawai sedikit maka proses penerbitan akan semakin lambat sehingga banyak pemohon yang malas untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan.

- 2) Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan

Dalam pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan harus melampirkan syarat-syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh

^{3 3} Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011.hlm. 11

pemohon. Apabila syarat tersebut tidak lengkap maka formulir akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

b. Faktor-faktor pendukung eksternal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi suatu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang menentukan apakah pelaksanaan aturan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menentukan apakah pengusaha perdagangan peduli terhadap usahanya. Dalam hal ini pemohon lebih berperan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun faktor-faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan meliputi :

1) Tingkat kepedulian Pengusaha perdagangan

Suatu peraturan akan berjalan efektif apabila ada kepedulian dari pengusaha perdagangan kepada masyarakat karena masyarakat sekitar sangat mempengaruhi pengusaha perdagangan dalam melakukan izin usaha perdagangan. Bila usaha perdagangan tersebut terdapat suatu gangguan kepada masyarakat sekitar dan pengusaha tidak mempunyai kepedulian atas gangguan tersebut kepada masyarakat sekitar maka Surat Izin Usaha Perdagangan tidak akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Tingkat produktifitas pengusaha perdagangan

Pengusaha perdagangan yang produktif ialah pemohon dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disiplin dan tidak malas, sehingga mampu untuk mengajukan pengurusan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Masyarakat disebut produktif apabila telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan keinginannya. Sehingga dari segi kesadaran mampu melaksanakan kewajibannya atas syarat yang ditentukan oleh peraturan tersebut dalam usahanya untuk memperoleh SIUP. Ketidakmampuan dalam meningkatkan produktifitas berakibat

munculnya kemalasan seperti, pengusaha perdagangan yang tidak memiliki kemampuan produktifitas akan menjadi malas untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Tingkat ekonomi

Tingkat ekonomi mempengaruhi dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Seorang pengusaha akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha perdagangan bila tingkat ekonomi dari usahanya meningkat. Sedangkan bila tingkat ekonomi pengusaha itu tetap ataupun rendah maka mereka tidak akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Kebanyakan pengusaha beranggapan bahwa Surat izin Usaha Perdagangan tidak diperlukan bila tingkat ekonomi mereka tetap atau rendah karena mereka acuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

4) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan pendidikan agar dapat belajar dari pengalaman. Masyarakat terdidik dengan sendirinya tidak akan mudah untuk dibohongi. Tingkat pendidikan menentukan apakah masyarakat mampu untuk mematuhi, memahami, dan mempelajari informasi tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Sehingga masyarakat mampu melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan. Tetapi apabila mereka tidak mampu untuk mematuhi, memahami, dan mempelajari informasi tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka banyak sekali pengusaha perdagangan yang tidak melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan.

5) Tingkat kepatuhan

Tingkat kepatuhan juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Bila masyarakat patuh pada aturan pemerintah maka

segala kemudahan akan didapatnya, sedangkan bila masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah maka yang didapat hanyalah kesulitan semata. Kepatuhan disini ialah kepatuhan dalam hal mematuhi peraturan pemerintah dan melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi masyarakat yang ingin memperoleh bukti *legalitas* yang membolehkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pengusaha dagang.

6) Tingkat Kebudayaan Masyarakat

Kebudayaan memang peranan penting dalam kehidupan masyarakat ditanamkan sejak Indonesia lahir hingga dewasa oleh orang tua. Manusia belajar dengan apa yang dilihatnya, bila dari kecil mereka terlatih untuk mematuhi peraturan maka dewasa pun mereka akan terbiasa dengan peraturan yang berlaku. dikemudian hari apabila masyarakat memiliki suatu usaha perdagangan maka dengan kesadaran pengusaha tersebut akan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan dengan sendirinya. Begitu pula sebaliknya bila dari kecil mereka tidak terlatih untuk mematuhi peraturan maka dewasa pun mereka tidak akan terbiasa dengan peraturan yang berlaku sehingga banyak pengusaha yang tidak sadar akan pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut.⁴

Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya SIUP bagi suatu usaha perdagangan karena selain untuk kepentingan pemilik usaha perdagangan itu sendiri juga agar usaha perdagangan yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas dan agar pemilik usaha perdagangan tersebut terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, dilain pihak dengan dimilikinya Surat Izin Usaha Perdagangan berarti pemohon telah membantu pihak Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tanggal 7 Januari 2013

dalam menertibkan administrasi perizinan. Apabila pengusaha perdagangan terbiasa untuk selalu mentaati suatu peraturan yang berlaku dalam melakukan suatu tindakan, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pengusaha perdagangan lain dan tertanam suatu kebiasaan untuk selalu bertindak secara disiplin dan sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada.

c. Faktor-faktor penghambat

Hambatan-hambatan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di dalam praktek. Hambatan ini lebih ditujukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha perdagangan selaku pihak pemohon izin. Hambatan ini dibagi menjadi dua segi yaitu : hambatan intern dan hambatan ekstern.

- a) Hambatan intern ialah hambatan di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. hambatan-hambatannya adalah :
 - 1) Terbatasnya sarana dan prasarana
 - 2) Masih banyaknya Perda yang belum disesuaikan.
 - 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang memerlukan izin gangguan dan IMB, sehingga akan memerlukan waktu yang lama.
 - 4) Anggaran yang masih kurang.
- b) Hambatan ekstern ialah hambatan di luar instansi pemerintah yang bersangkutan yang munculnya dari pihak pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan. Hambatan-hambatannya adalah :
 - 1) Masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 2) Belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Mereka kebanyakan baru mengurus jika sangat memerlukan misalnya : untuk meminjam uang ke bank,dll.

- 3) Adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.
 - 4) Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepat waktu.
 - 5) Aparatu pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.
2. Upaya kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blitar dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan

Dalam rangka mengantisipasi hambatan, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :⁵

- a) Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pemohon.

Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimaksud adalah dengan mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Misalnya saja waktu yang dihasilkan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi).

- b) Melakukan sistem “jemput bola” dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengadakan kunjungan ke beberapa kecamatan. Sistem ini dilakukan karena terbatasnya transportasi untuk menuju Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. maka, dengan adanya sistem ini pemohon atau pengusaha akan mudah untuk melakukan proses izin usaha perdagangan.

- c) Mengadakan *One Day Service* kepada pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pengusaha atau pemohon disini dapat melakukan proses pembuatan Surat izin Usaha Perdagangan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan perizinannya dalam satu hari jika berkas sudah lengkap.

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tanggal 7 Januari 2013

- d) Melakukan perbaikan terhadap beberapa peraturan tentang perizinan dan retribusi sesuai dengan otonomi daerah dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbaikan disini dimaksudkan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar dalam perbaikan peraturan khususnya tentang perizinan. Misalnya saja dalam peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, pemerintah kabupaten Blitar sampai saat ini belum ada perda yang mengatur tentang SIUP. Untuk itu perlu adanya perbaikan dengan membuat perda. Sedangkan untuk retribusi, dikelola dengan transparan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

- e) Meningkatkan sarana dan prasarana.

Suatu proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan juga ditentukan oleh jumlah sarana dan prasarana. Masyarakat akan menjadi mudah untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan apabila sarana dan prasarana yang tersedia lengkap seperti : jumlah loket yang memadai, ketersediaan kertas formulir Surat Izin Usaha Perdagangan, ruangan yang memadai untuk pemohon dalam melakukan Izin Usaha Perdagangan.

- f) Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait maka, prosedur permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat berjalan secara efisien dengan cara mengakses informasi dengan sistem online.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Terdapat 2 macam faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yaitu pertama faktor-faktor pendukung baik dari faktor internal maupun eksternal. Kedua, faktor-faktor penghambat baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

1) Faktor-faktor pendukung

a. Faktor-faktor pendukung internal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi suatu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), meliputi :

- a) Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
- b) Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan.

b. Faktor-faktor pendukung eksternal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi suatu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang menentukan apakah pelaksanaan aturan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menentukan apakah pengusaha perdagangan peduli terhadap usahanya. Dalam hal ini pemohon lebih berperan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun faktor-faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan meliputi :

- a) Tingkat kepedulian Pengusaha perdagangan
- b) Tingkat produktifitas pengusaha perdagangan
- c) Tingkat ekonomi
- d) Tingkat Pendidikan
- e) Tingkat kepatuhan
- f) Tingkat Kebudayaan Masyarakat

2) Faktor-faktor penghambat

Hambatan-hambatan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di dalam praktek. Hambatan ini lebih ditujukan kepada Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha perdagangan selaku pihak pemohon izin. Hambatan ini dibagi menjadi dua segi yaitu : hambatan intern dan hambatan ekstern.

- a. Hambatan intern ialah hambatan di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. hambatan-hambatannya adalah :
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana
 - b) Masih banyaknya Perda yang belum disesuaikan
 - c) Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang memerlukan izin gangguan dan IMB, sehingga akan memerlukan waktu yang lama.
 - d) Anggaran yang masih kurang
 - b. Hambatan ekstern ialah hambatan di luar instansi pemerintah yang bersangkutan yang munculnya dari pihak pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan. Hambatan-hambatannya adalah :
 - a) Masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - b) Belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Mereka kebanyakan baru mengurus jika sangat memerlukan misalnya : untuk meminjam uang ke bank,dll.
 - c) Adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.
 - d) Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepat waktu.
 - e) Aparatu pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.
2. Upaya kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blitar dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan

Dalam rangka mengantisipasi hambatan, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- a) Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pemohon.

- b) Melakukan sistem “jemput bola” dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- c) Mengadakan *One Day Service* kepada pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan.
- d) Melakukan perbaikan terhadap beberapa peraturan tentang perizinan dan retribusi sesuai dengan otonomi daerah dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terkait dengan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :

1. Bagi pemerintah kabupaten blitar, seharusnya pemerintah segera menyesuaikan perda yang berkaitan dengan perizinan misalnya izin usaha perdagangan masih belum ada perda yang mengaturnya. Sehingga dalam pelaksanaan izin usaha perdagangan mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti.
2. Bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, agar nantinya di dalam proses penerbitan izin dapat berjalan secara efektif.
3. Bagi pemohon atau pengurus izin sebaiknya untuk lebih menaati peraturan yang ada untuk memperoleh bukti legalitas yang membolehkan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Paimin Napitupulu, 2007, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Bandung. Alumni.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.